

REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL DEMOKRAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
LEVI MAULANA
NIM. E02110064

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

Email: levimaulanalevi@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara rekrutmen politik dalam keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan sudah mencapai kuota 30% yang harus dipenuhi, akan tetapi tetap menunjukkan adanya keterwakilan politik (*political representative*) yang kurang baik. Serta budaya patriarki walaupun sulit diubah namun sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran dan peningkatan nilai mengenai kedudukan dan peran perempuan. Walaupun tidak berlaku umum bagi seluruh elemen perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda-beda, akan tetapi cukup mempengaruhi bagaimana posisi kesetaraan gender yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sistem politik sebagai penghambat keterwakilan politik perempuan pada pemilihan umum legislatif.

Kata-kata Kunci : Rekrutmen Politik, Partai Politik, Legislatif.

Abstract

This thesis aims to find out how to find out how political recruitment in the representation of women in parliament rakyat. Metode used in this research is descriptive qualitative method, though the formal membership of women legislators has reached a quota of 30% that must be met, but still showed political representation (*political representatives*) who are less good. As well as the culture of patriarchy although difficult to change but little by little has been shifted and the increase in the value of the position and role of women. Although it is not common to all elements of women who have high levels of education, economic level vary, but enough influence how gender equality prevailing position in society. The results showed that the political system as a factor inhibiting women's political representation in legislative elections

Keywaords: *Rekrutmen Politik, Partai Politik, Legislatif.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Rekrutmen ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala Partai politik itu merupakan Partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala

Partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. (Surbakti (1992:118))

Menurut Schermerhorn, 1997 Rekrutmen (Recruitment) adalah “proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Rekrutmen politik perempuan dalam kepengurusan suatu partai politik Nasdem tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan suatu kebijakan upaya menarik atau mengumpulkan sejumlah calon kaum perempuan yang berpotensi mengisi jabatan yang kosong dalam partai politik.

Rekrutment politik merupakan kegiatan partai politik untuk mengikutsertakan serta aktif seseorang kaum perempuan dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memberikan kesempatan secara langsung atau tidak

langsung dalam kegiatan politik praktis. Sebagai perwujudan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berarti dalam Negara demokrasi, kedaulatan yang tertinggi berada di tangan rakyat, dan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILU). Seperti salah satu konsepsi modern yang diajukan oleh Joseph Scumpeter yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi.

Terkait dengan pengrekrutan kaum perempuan atau 30 % keterwakilan kaum perempuan dalam kepengurusan partai politik dan anggota calon legeslatif tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang partai politik, dan Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilu telah mengamanatkan 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan menjadi anggota parlemen di tingkat pusat maupun daerah, serta dalam daftar nama yang telah diajukan untuk calon anggota legislatif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang ingin dibahas oleh peneliti adalah: bagaimanakah tingkat keinginan kaum perempuan dan keikutsertaan dalam Pemilihan calon legislatif partai Nasdem tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya?

3. Tujuan Penelitian

Searah dengan fokus masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian penting untuk dirumuskan agar penelitian tetap sinkron dengan aspek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Mendeskripsikan pelaksanaan rekrutmen politik perempuan dalam Pemilihan calon legislatif Partai Nasdem tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya.
- b) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya keinginan kaum wanita bergabung ke partai politik dan besarnya persentase calon anggota legislatif khususnya perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kubu Raya.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi partai politik dan keinginan kaum perempuan bergabung ke partai politik.
- b. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi partai politik yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya dan juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya program ilmu politik.

5. Landasan Teori

Proses rekrutmen politik sebagai upaya menarik atau mengumpulkan sejumlah kaum perempuan yang berpotensi mengikuti kegiatan Pemilu Legislatif. Sejalan dengan hal tersebut Hariandja (2009:99), menyatakan bahwa “pengrekrutan (*recruitment*) adalah upaya untuk memperoleh orang-orang (kaum perempuan) yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota partai politik”.

Menurut Sanit (2005:185) menyatakan penarikan (*recruitment*) adalah

“proses mencari anggota partai politik yang sesuai dengan kualifikasi atau kebutuhan partai yang tersedia”. Kemudian Surbakti (2007:48) menyatakan penarikan adalah “menganalisis perilaku seseorang yang yang diperlukan dalam partai politik sesuai dengan kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman”. Berdasarkan pernyataan para ahli di atas mengenai masalah rekrutmen, menunjukkan bahwa pengrekrutan dilakukan bila mana ada partai politik yang membutuhkan keanggotaan / kaderisasi, khususnya kaum perempuan. Kekosongan dalam partai politik bisa terjadi akibat adanya anggota partai politik yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan akibat adanya ekspansi yang dilakukan oleh partai politik yang sebelumnya ditentukan dalam perencanaan kaderisasi partai politik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan rekrutmen politik perempuan dalam pemilihan calon legeslatif Partai Nasdem tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan suatu kebijakan dalam rangka menarik atau mengumpulkan sejumlah calon kaum perempuan yang berpotensi sebagai kaderisasi dalam partai politik. Penarikan kaum perempuan dalam partai politik merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk menempatkan kaum perempuan dalam berpolitik praktis.

Persyaratan ini tentu saja harus di tentukan sebab hal itu akan membantu mengidentifikasi kaum perempuan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan siapa yang dibutuhkan dan di mana mereka berada. Usaha untuk lebih menjamin objektivitas dalam pengrekrutan politik perempuan berdasarkan sistem prestasi, maka perlu diadakan penilaian terhadap kemampuan berpolityiknya. Berbicara tentang rekrutmen politik perempuan, tidak terlepas dari konteks keterlibatan kaum perempuan dalam partai politik. Sanit, (2005:23): “Keterlibatan diartikan sebagai bentuk keikutsertaan seseorang atau badan dalam suatu pekerjaan atau rencana besar”. Dalam pengertian yang lebih aplikatif. Roger H. Soltau dalam Budiardjo (2002:46), menyatakan bahwa: “keterlibatan setiap warga Negara suatu Negara di perhatikan oleh negara melalui aktivitas pemerintahannya”.

Hal ini senada dengan apa yang menjadi dasar pemikiran dari dibuatnya kebijakan UU RI Nomor: 12 tahun 2006, tentang kewarganegaraan dimana dinyatakan bahwa pemerintah RI menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia.

Bachrach dalam Sanit (2005:124) memandang penarikan kaum perempuan dalam partai politik tidak hanya untuk kepentingan pengembangan diri tetapi juga sebagai dasar bagi tumbuhnya masyarakat bebas. Maka munculnya teori demokrasi elit selalu ditolak oleh para ahli, karena masyarakat dalam teori ini selalu dibentuk oleh kekuatan yang tidak bebas dan impersonal dan selalu memandang perkembangan setiap individu. Sedangkan demokrasi selalu menempatkan pada pengembangan kemampuan rakyat. Sementara bagi demokrasi adalah sebagai cara hidup dalam peningkatan degradasi kerja yang selalu berlandaskan kepada partisipasi dalam bidang politik yang lebih luas.

Hal senada juga terungkap oleh Hendardi (2007:57) yang menyatakan bahwa: “keterlibatan politik kaum perempuan adalah kegiatan kaum seseorang atau sekelompok orang (kaum perempuan) untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah”. Kegiatan ini menurut Hendardi mencakup tindakan, seperti memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan dengan pejabat atau parlemen.

Lebih lanjut Hariandja (2009:99) menyatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber:

- a. Kebijakan organisasi
- b. Perencanaan Sumber Daya Manusia
- c. Kebiasaan Perekrut
- d. Kondisi Lingkungan Eksternal
- e. Persyaratan Jabatan
- f. Biaya Penarikan

1. Partai Politik

Menurut Carl J. Fredinich dalam Apter, (2006:71) yang dimaksud dengan partai politik adalah “sekelompok yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap perintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemampaatan yang bersipat idil maupun material”.

Sementara itu RH. Soltan dan Haryanto (2002:85) mendefinisikan “partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memampatkan kekuasaannya untuk memilih dengan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka”.

Kedua pendapat ilmunan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan adanya beberapa ciri yang melekat pada suatu parpol, yaitu: (1) Parpol merupakan suatu

organisasi atau kelompok masyarakat yang terorganisir secara baik; (2) Tujuan Parpol adalah mencari, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan; (3) kekuasaan yang akan dicarinya tersebut nantinya akan di gunakan untuk mencari kemampaatan baik secara idiil maupun material.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk keterlibatan kaum perempuan dalam partai politik, Budiharjo (2002:58), membaginya menjadi:

- a. Keterlibatan dalam bentuk material adalah partisipasi secara langsung maupun tidak langsung (lewat perantara), baik secara individu maupun kelompok kepada suatu partai dalam bentuk dukungan barang (sarana dan prasarana) maupun uang.
- b. Keterlibatan dalam bentuk moril adalah partisipasi secara langsung (*face to face*) maupun melalui media (cetak elektronik), baik secara individu maupun kelompok kepada suatu partai dalam bentuk ide ataupun konsep pemikiran.
- c. Keterlibatan dalam bentuk fisik adalah partisipasi secara langsung dalam segala kegiatan kepartaian berupa keanggotaan aktif maupun pasif (simpatisan).

Dari beberapa ciri yang melekat tersebut, nampak bahwa partai politik selalu berupaya di dalam prilakunya berorientasi pada kekuasaan, karena ia

secara terus menerus berusaha menggunakan berbagai cara agar kekuasaan itu ada padanya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh jika ia memperoleh dukungan masa untuk memilikinya. Karena itu existensi suatu partai politik terletak pada sejauh mana ia memperoleh dukungan massa maka akan semakin kuat dan eksis partai politik itu. Sebaiknya semakin kecil pula peran partai politik tersebut dalam kancan kekuasaan (Gaffar:2006:124). Kemudian ada bermacam-macam bentuk penarikan politik kaum perempuan yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu kegiatan politik “Konvensional” adalah bentuk penarikan politik yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk “konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekuasaan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi penarikan politik dapat dipakai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, intergritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan kaum perempuan.

Menurut Masoed (2001:47), bahwa rekrutmen politik perempuan dapat di lihat dalam bentuk-bentuk antara lain :

- a) Konvensional, meliputi:
 - o Kegiatan-kegiatan kampanye (menyampaikan pesan-pesan politik, melakukan orasi politik dan diskusi politik)

- o Sebagai anggota partai (adanya tekanan, ikut-ikutan dan kesadaran berpolitik)
- o Non konvensional, meliputi : pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi. Dari kedua bentuk penarikan politik dari kalangan perempuan dapat dijelaskan bahwa pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar.

Dewasa ini pemberian suara terdapat di semua sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter. Di Indonesia saja misalnya setiap 5 (lima) tahun sekali, semua warga negara termasuk kaum perempuan di harapkan berpartisipasi dalam pemilihan umum dan semua calon untuk menjabat politik dan pemerintahan untuk menduduki kedudukan dalam satu level jabatan seperti Presiden, Anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan sebagainya harus disetujui oleh partai politik. Bentuk konvensional lain juga dijalankan oleh sejumlah kecil kaum perempuan dalam sistem politik otoriter maupun demokratis, dan dalam hampir

semua kebudayaan politik memperhatikan kecenderungan ideologi dari masyarakat atau nilai-nilai yang timbul karena kebudayaan politiknya, kegiatan-kegiatan partisipasi selain pemberi suara biasanya melibatkan biaya yang lebih besar dalam arti waktu, tenaga dan uang. Selain konvensional bentuk lain dari penarikan politik yang bersifat demokratis, proses dan tidak kekerasan.

Menurut Gurr (1990:125), mengatakan bahwa “tindakan kekerasan bersifat episodik dalam sejarah sebagian besar masyarakat politik dan kronis dalam beberapa masyarakat”. Tindakan kekerasan yang lebih umum adalah kudeta, dimana sekelompok kecil konspirator, biasanya dari kalangan militer, menggulingkan pemerintah serta menggantinya dengan satu kelompok penguasa baru bahkan mungkin menciptakan rezim baru. Kebanyakan dari usaha kudeta ini relatif tindakan berdarah, tetapi beberapa yang lain sangat banyak menumpahkan darah.

Bentuk keikutsertaan politik yang berwujud demonstrasi, protes dan tindakan kekerasan ini biasanya dipergunakan orang untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijaksanaan pemerintah bila bentuk-bentuk aktivitas lain tidak bisa dilakukan atau nampak tidak efektif dan frekuensi penggunaannya berbeda-beda menurut situasi dan masyarakatnya. Beberapa masyarakat jarang terjadi karena sistem politiknya

cukup tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan kewarganegaraannya, tetapi dalam masyarakat-masyarakat lainnya tindakan-tindakan semacam itu lebih umum atau bahkan merupakan alat aktivitas politik yang rutin. (Rauf, 2004:48). Banyak cara yang dapat dilakukan partai politik dalam mengrekrut dalam politik, bentuk-bentuk rekrutmen politik sebagai mana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dimana terdapat lima bentuk kegiatan. Kegiatan politik yang mencakup konsep rekrutment politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas.

Biasanya diadakan perbedaan jenis rekrutmen menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, orang yang melakukan kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan prakasa sendiri, seperti memberi suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivitas politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau kelompok kepentingan.

Menurut Surbakti (2007:112), bahwa dukungan masa khususnya kaum perempuan terhadap suatu partai politik dapat di bentuk melalui berbagai cara antara lain:

- a) Adanya hubungan yang harmonis dan terus menerus antara elit partai (pengurusan partai) dengan kaum perempuan.
- b) Adanya program yang sesuai antara program partai dengan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan khususnya kebutuhan yang mendesak untuk ditangani.
- c) Elit partai mampu menyakinkan kaum perempuan tentang gambaran masa depan yang lebih baik.
- d) Penggunaan metode yang tepat sesuai dengan isu gender tersebut.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan massa pendukungnya diatas harus terus menerus dilakukan dengan berbagai macam variasinya disesuaikan situasi dan kondisi masyarakatnya. Jika tidak ingin partai politik itu ditinggalkan pendukungnya, yang akhirnya hal ini berlanjut pada kematian partai. Bagi partai politik, massa dapatlah diibaratkan seperti air bagi ikan, yang berarti tanpa dukungan massa partai politik akan mengalami kematian karenanya partai politik haruslah selalu berupaya agar hubungannya dengan massanya terjaga dengan baik.

Partai politik dibentuk karena adanya kepentingan dari anggota parlemen untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Untuk itu ia membutuhkan dukungan dan masa. Dukungan massa ini

dilakukan melalui parpol yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang menyadari tentang hal mereka untuk ikut serta dalam proses dan kegiatan politik. Untuk itu menurut mereka perlu adanya wadah (lembaga) untuk berkiprah itu, dan lembaga tersebut adalah partai politik (Imawan:2003:97). Kegagalan teori elitis, perhatian para ilmuwan politik beralih pada model pluralis, dimana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada suatu kelompok, melainkan menyebar kedalam berbagai kelompok kepentingan yang saling berkompetensi untuk mendapatkan kekuasaan. Adapun istilah lain yang secara umum digunakan oleh para teoritis kelompok adalah peluang dalam konteks mempengaruhi para pembuat keputusan. Disamping itu teori kelompok juga selalu menyepelkan konsep ide-ide perasaan, karakter rakyat, kehendak umum, kesejahteraan umum, bahkan hukum dan keadilan yang dianggap sebagai pengacau. Konstitusi politik dapat berbeda, berdasarkan perbedaan kualifikasi hak milik. Mungkin tidak ada kualifikasi sama sekali mengenai pemungutan suara dewan maupun untuk menduduki jabatan atau kualifikasi itu rendah tau tinggi dan hanya mengenai jabatan tertentu tidak untuk untuk yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa konstitusi politik demokrasi akan berbeda pula berhubung dengan susunan perekonomian

masing-masing Negara. Analisis mengenai faktor politik dalam demokrasi telah dihadapkan dengan masalah tentang Negara cita-cita, artinya bentuk pemerintah yang bagaimanakah yang terbaik buat sebagian besar negara-negara jika kita mengesampingkan keadaan khusus dan menganggap tiada kelebihan kebijakan dan kemampuan politik dan pada yang biasanya sanggup di lakukan Negara tersebut.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang akan di gunakan adalah sesuai dengan masalah, sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang tepat digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Faisal (2002:12) menyatakan penelitian deskriptif adalah “penelitian didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini, termasuk berbagai tipe penelitian sehingga di temukan hubungan yang mungkin terjadi di antara variabel-variabel”.

Penelitian ini dimulai dari studi kepustakaan yaitu menemukan teori-teori yang berkaitan dengan rekrutmen politik

perempuan, selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan dimulai dengan membuat pedoman wawancara, selanjutnya melakukan wawancara, dan mencari dokumentasi terkait dengan rekrutmen politik perempuan, melakukan analisis data menggunakan teknik analisis model Sugiyono meliputi:

- a. Pengumpulan data, yaitu sebagai konsep dasar langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, pertama-tama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar penelitian, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkatagorikannya.
- b. Reduksi data, yaitu suatu kegiatan proses penghalusan atau pemilihan data yang di peroleh di lapangan, proses tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang di peroleh dengan memberi kode, mengklarifikasi, menelusuri tema-tema, membuat gugus, menulis memo dan memilah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan

informasi tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara yang kan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian data di sajikan dalam bentuk narasi dan tidak menutup kemungkinan penyajian data dapat dilakukan dengan gambar-gambar matrik agar lebih mudah dimengerti semua pihak.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir, dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang di sajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Partai Nasdem dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 tanggal Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini, salah satunya adalah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil oleh seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan

empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara mempercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun.

Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi ketua umum, Surya Paloh antara lain menjelaskan, jabatan ketua umum bukanlah kredit poin. Pasalnya, Surya Paloh-Iah yang mendirikan Partai NasDem dan sempat menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem, sejak Partai ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Surya Paloh terpilih secara resmi menjadi ketua umum Partai NasDem, adalah Patrice Rio Capella yang dipercaya sebagai ketua umum.

Kongres I Partai NasDem 25-26 Januari 2013 disebut Surya Paloh sebagai tonggak sejarah Partai ini dalam melakukan gerak dan langkah ke depan untuk melakukan perubahan melalui gerakan Restorasi Indonesia. Partai ini harus mampu memberi catatan dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan

Partai-partai politik di Indonesia. Meskipun baru, Partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Surya Paloh adalah Partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkret (Restorasi Indonesia).

Lolos Verifikasi Faktual

Pada hari Senin 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarakan bagi Partai NasDem. Pasalnya, hari itu KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual diseluruh Provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

- a. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal.
- b. Memiliki lebih dan 30% anggota perempuan.
- c. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014.

Partai NasDem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Itu berarti Partai NasDem bersiap mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014.

Keputusan KPU meloloskan Partai NasDem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7

Januari 2013. Rapat pleno dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau Pemilu.

Dalam pemilu 2014, Partai NasDem mendapatkan nomor urut 1

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 Partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya Partai baru yang lolos sebagaipeserta Pemilu 2014.⁹ Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik ditataran para elit partai Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW II Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut, Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

2. Letak Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Secara historis sebelum ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se-Kalimantan, Wilayah Kabupaten Pontianak merupakan 3 (tiga) Daerah Pemerintah Administratif Swapraja, yaitu Swapraja Mempawah dengan Ibu Kota Mempawah. Swapraja Landak dengan Ibu Kota Ngabang dan Swapraja Kubu dengan Ibu Kota Kubu.

3. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Kubu Raya berada di sisi barat Daya Propinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi $0^{\circ} 13'40,83$ sampai dengan $1^{\circ} 00'53,09''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 02'19,32''$ Bujur Timur sampai dengan $109^{\circ} 58'32,16''$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan beberapa wilayah dengan Kabupaten lain serta berbatasan langsung dengan laut. Diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan:

- a. Utara : Berbatasn dengan Kabupaten Pontianak.
- b. Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang.

- c. Barat : Berbatasan dengan laut Natuna.
- d. Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Sanggau.

Dengan demikian Kabupaten Kubu Raya dengan Ibu Kota Sungai Raya tidak hanya berbatasan dengan daratan saja tetapi juga berbatasan langsung dengan laut.

4. Luas Wilayah

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.985,24 km². Dari 9 kecamatan pada akhir tahun 2012, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Batu Ampar (2.002,70 Km² atau 28,67 persen dari luas Kabupaten Kubu Raya) dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah kecamatan Rasau Jaya yaitu 111.07 Km² atau 1,59 persen dari luas Kabupaten Kubu Raya.



5. Penduduk

Pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Kubu Raya tercatat sebesar

500.970 jiwa. Jika dibagi dengan luas daerah Kubu Raya yang cukup luas yakni 6.985,24 Km², maka kepadatan penduduk tercatat sebesar 72 jiwa per Km² dan ini terhitung masih cukup padat. Penyebaran penduduk Kubu Raya terlihat belum merata dimana Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 233 jiwa per Km², Kecamatan Rasau Jaya dengan kepadatan penduduk sebesar 212 jiwa per Km² kemudian diikuti Kecamatan Sungai Raya sebesar 202 jiwa per Km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling jarang adalah Kecamatan Terentang yakni 13 jiwa per Km².

Banyaknya pencari kerja di Kabupaten Kubu Raya jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Mulai pada tahun 2012, rata-rata pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.774 orang. Adapun pencari kerja laki-laki jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan pencari kerja perempuan, dimana terdapat 1.312 orang atau 47,3 persen pencari kerja laki-laki dan 1.462 atau 52,7 persen pencari kerja perempuan. Dari sekian orang pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.062 orang atau 38,28 persen memiliki ijazah SLTA, dan 951 atau 34,28 persen memiliki ijazah Diploma dan sebanyak 591 orang atau 21,30 persen ijazah Sarjana.

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten termuda diwilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terbentuk sejak sidang paripurna DPR RI 17 Juli 2007 dimana pengesahan Undang-undang tentang pembentukan Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan di Sungai Raya.

Pada tahun 2012 perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik pada instansi dengan status pegawai pusat maupun daerah terlihat cukup mencolok, dimana jumlah pegawai laki-laki 1.216 orang atau 71,28 persen sedangkan pegawai perempuannya hanyasebesar 490 orang atau 28,72 persen. Sedangkan dilihat dari golongan yang ada, sebagian besar masih berada pada golongan 111 yakni sebesar 1026 orang atau 60,14 persen, sedangkan golongan 1 adalah golongan yang paling kecil yakni sebesar 6 orang atau 0,33 persen. Jika ditinjau dari jenjang pendidikan sebagian besar merupakan lulusan DIV/S1/S2/S3 yakni sebanyak 815 atau 47,77 persen disusul kemudian lulusan SLTA sebanyak 511 atau Persen disusul kemudian lulusan SLTA sebanyak 511 atau 29,95 persen, jumlah pegawai negeri yang pernah mengikuti pendidikan pimpinan berjumlah 275 orang dengan rincian 220 orang laki-laki atau 80,73 persen dan sisanya yakni 53 oarang atau 19,27 persen berjenis kelamin perempuan.

6. Analisis Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rekrutmen Politik Partai Nasdem di Kabupaten Kubu Raya

- a. Kendala Pola Rekrutmen Politik
- b. Kendala Sosial Ekonomi
- c. Metode Penyampaian Pesan
- d. Faktor Sistem Politik

Begitu pula dengan partai NasDem, yang memiliki tujuan dan pergerakan. Sebagai partai baru, partai NasDem sesungguhnya telah melaksanakan fungsi partai politik dengan cukup baik, akan tetapi dalam upaya pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya masih belum terlaksana dengan maksimal ini terlihat dari belum mampunya partai NasDem di Kubu Raya mengambil simpati masyarakat untuk memilihnya. Karena dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu fungsi partai politik adalah Sosialisasi politik, sosialisasi politik merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik juga merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain. Sosialisasi politik juga dipengaruhi oleh Status Sosial Ekonomi masyarakat pada suatu bangsa yang tentunya sangat

berpengaruh terhadap budaya politik suatu bangsa. Dalam hal ini yang menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam masyarakat adalah : keluarga, sekolah, peer group atau kelompok kontak langsung, pekerjaan dan media masa. Sosialisasi politik berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik. Dalam konteks politik negara Indonesia dengan sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan kepada demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak langsung arah politik Indonesia mengarah kepada kandungan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila Itu sendiri.

Pelembagaan sebuah partai politik juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukannya dalam melembagakan partainya sendiri, begitu pula pelembagaan partai dari segi sosialisasi politiknya yang pasti menunjang pembangunan pelembagaan partai. DPD dan DPW partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya dalam upaya melaksanakan sosialisasi politik beberapa diantaranya Partai Nasdem memiliki program pelembagaan sosialisasi politik untuk melakukan pendekatan dan pendukung dengan masyarakat, beberapa organisasi sayap yang mendukung dan telah di bentuk, seperti :

- a. Garda Pemuda
- b. Garda Wanita
- c. Liga Mahasiswa

Upaya melalui kinerja partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk memperkuat kedudukan partai NasDem itu sendiri media masa yang menunjang keberadaan partai NasDem di Kubu Raya, dan sosialisasi politik partai NasDem di Kubu Raya. Semua upaya yang dihasilkan dari kinerja partai NasDem Kubu Raya tersebut tidaklah terlaksana dengan cukup baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Dari keempat faktor yang paling tepat dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya seperti faktor pola rekrutmen politik, Sosial ekonomi, Sistem Politik dan Metode penyampaian pesan, penulis menyimpulkan bahwa faktor metode penyampaian pesan lah yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi rekrutmen politik partai NasDem di Kubu Raya.

1. Kendala Pola Rekrutmen Politik

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan bahwa faktor pola rekrutmen politik seperti : kendala pada pola pemeliharaan hubungan dengan para anggota juga merupakan bentuk dari pelaksanaan mekanisme pola rekrutmen politik , dimana partai NasDem Kubu Raya

juga melakukan rapat koordinasi dan evaluasinya dengan para anggotanya, akan tetapi itu semua dilakukan hanya sepihak, karena tidak semua dilakukan dengan optimal, maka dari itu juga ada beberapa organisasi sayap NasDem yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pengoptimalan kemampuan organisasional partai.

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah partai politik baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun dalam demokrasi yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi dalam partai politik mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal. Persoalan budget tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk didalamnya. Diperlukan biaya yang cukup besar untuk mengelola sebuah organisasi partai politik yang ada agar terbentuk sempurna karena kesediaan anggaran dana yang besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki.

2. Faktor Sistem Politik

Sistem kepartaian disebut kokoh dan dapat beradaptasi apabila partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini,

jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Partai NasDem belum dapat berbuat sebagaimana mestinya, karena lembaga yang dibentuk hanya dijadikan sebagai pelengkap partai saja.

3. Metode Penyampaian Pesan

Metode penyampaian pesan memang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik partai NasDem di Kubu Raya. Dalam metode penyampaian pesan ini partai politik harus berperan optimal sehingga partai yang dijalankan menjadi bermakna, maka dibutuhkan juga pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, Namun, pada kenyataannya banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik cenderung hanya mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kendala Pola Rekrutmen Politik

Perlu adanya evaluasi dan tahapan-tahapan yang dilalui Partai NasDem dalam pelaksanaan rekrutmen politiknya. Bagaimana pengurus sebagai agen sosialisasi Partai NasDem mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat terutama yang menjadi sasaran utamanya.

2. Kendala Sosial Ekonomi

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan sejumlah dana yang banyak. Apalagi dalam mengelola sebuah partai politik tidak sedikit yang harus dikeluarkan untuk kepentingan partai sehingga partai tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

3. Kendala Sistem Politik

Perlu adanya evaluasi pada sistem politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

4. Kendala Metode Penyampaian Pesan

Dalam metode penyampaian pesan partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan lagi terutama dalam bidang pendidikan politiknya. Agar masyarakat dan anggota partai NasDem di

Kubu Raya tidak terjerumus dalam *Moneypolitic*, Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2007. *Prihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Alfian, 1990. *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Alfian, 1990. *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Apter, David E. 2006. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta* : Gramedia Pustaka Utama.

Budhiarjo, Meriam. 2002. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.

Budiman, Arief. 1997. *Teori Negara, Kekuasaan, Demokrasi dan Pembaharuan Politik*. Jakarta: Gramedia.

Faisal, Sanafiah. 2002. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV.Rajawali.

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia 1990: Rajuvenasi Aliran (Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Keempat)*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Gurr, Ted Rovert. 1990. *Political Participation*. New York: The Macmillan Company and The Free Press.
Haryanto. 2002. *Sistem Politik*. Yogyakarta: Liberty.

Huntington, Samuel P. 2004. *Partisipasi Politik di Negara berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hendardi. 2007. *Hukum dan Kesadaran Politik Rakyat*. Jakarta: CIDES.

Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BCSE.

Haricahyono, Cheppy. 2001. *Ilmu Politik Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara wacana.

Hamid, Zulkifly. 2006. *Pengantar Ilmu Politik*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Imawan, Riswandha. 2003. *Faktor-faktor yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Fungsi Legislatif Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Kartawidjaja, Pipit R. 2003. *Alokasi Kursi Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih*. Jakarta: ELSAM.

Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. IKIS: Yogyakarta.

Mustofa, Syahrul. 2005. *Pilkada Langsung Sebuah Demokrasi Lokal*. KPUD KSB-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat.

Mas' oed, Mochtar. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang :

LP21 dan LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Praktino, 2004. *Proses, Tahapan, dan Distorsi dalam Pemilu 2004*. Yogyakarta: CSPPS Books.

Piliang, Indra J. 2005. *Pilkada Langsung Untuk Siapa?* Kompas, 29 Maret 2005.

Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo, Jakarta.

Sanit, Arbi. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Satori, Djam dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yugha, 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: PT. Erlangga

2. Sumber Lainnya:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Himpunan Undang-Undang Bidang Politik. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 2003

Undang-undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik.

3. Sumber Jurnal:

Eria Rangga Andika, (2013) Dalam Judul *Skripsi Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Banyumas.*

Adi Pranadipa, (2013) *Dalam Judul Skripsi Peran Partai golkar*





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lexi Mamana
 NIM / Periode lulus : E. 02119064 /
 Tanggal Lulus : 05-02-2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi / IPOL
 E-mail address/ HP : leximamana@untan.ac.id / 08.5750945076

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ... Aspirasi ... *) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Racut man prunt Paramman Dalam Panman Caon
 Lembarit Parcu Nahanu Namokrat Tahun 2013
 Di Kabupaten Kubu Raya

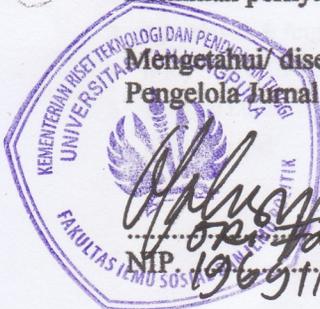
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

[Signature]
 Orlan Sabriyana, S.I.P. M.S.
 NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 21-02-2016

[Signature]
 Lexi Mamana
 NIM. E. 02119064

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)